

BAB III

**KONDISI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN DAMPAK
OPERASI PERTAMBANGAN PT. KALTIM PRIMA COAL DI
SANGATTA**

Penambangan merupakan kegiatan yang erat kaitanya dengan sumber daya alam dan masyarakat. Secara tidak langsung proses tersebut akan menyentuh masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah dampak negatif yang ditimbulkan, perusahaan pertambangan mendapatkan profit dari proses eksploitasi yang dilakukan. Namun di sisi lain masyarakat sekitar selaku penduduk dan tuan rumah justru terkena dampak dari operasi pertambangan tersebut. Sehingga hal tersebut dirasa menimbulkan kerugian di pihak masyarakat.

Dalam prosesnya, penambangan batubara PT. Kaltim Prima Coal (KPC) di kabupaten Kutai Timur sedikit banyak membawa dampak negatif terhadap masyarakat. Bahkan dampak negatif tidak hanya menyentuh masyarakat saja melainkan juga lingkungan. Fenomena ini disinyalir akan membawa masalah yang berkepanjangan. Hal itulah yang dapat menjadi pemicu timbulnya pandangan negatif masyarakat kabupaten Kutai Timur terhadap PT. KPC. Sehingga akan berujung pada terjadinya hubungan yang kurang harmonis antara perusahaan dan masyarakat.

A. Profil Kabupaten Kutai Timur

Kutai Timur (Kutim) adalah nama sebuah kabupaten yang kaya akan sumber daya alam di Kalimantan Timur. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kab. Kutai yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 47 tahun 1999. Secara administrasi daerah ini memiliki luas 35.747 km² (17% dari wilayah Kaltim) dengan 18 kec dan 135 desa. Kab. Kutai Timur diresmikan oleh Mendagri pada tanggal 12 Oktober 1999, sebagai salah satu dari 13 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Timur. Terletak antara 118°-58'19" Bujur Timur dan 115°-56'26" Bujur Barat serta di antara 1°52'39" Lintang Utara dan 0°-20'10" Lintang Selatan.²⁹

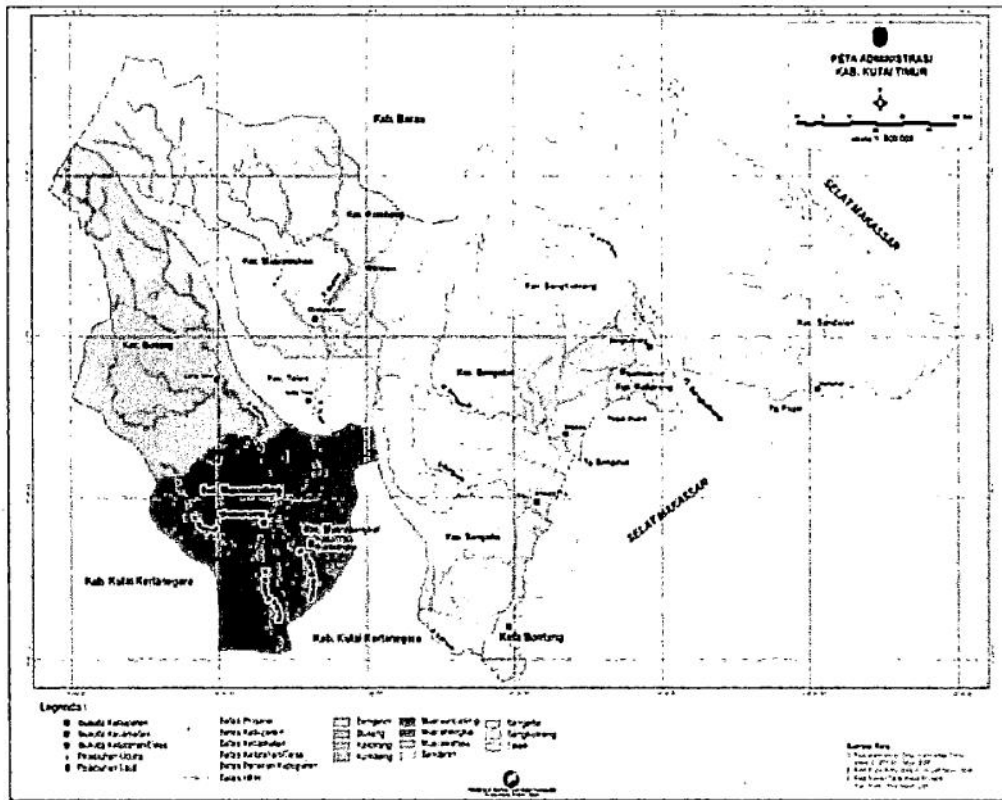
Ibu kota Kabupaten Kutai Timur adalah Sangatta dalam ejaan lama dan Sengata dalam ejaan yang baru. Nama Sengata berasal dari nama Singa Kerta yang merupakan pemimpin yang berkuasa sekitar tahun 1812. Dia disebut demikian karena Kerta (nama asli pemimpin itu) adalah orang yang kuat, berbadan besar, tinggi dan kekar. Kekuatannya yang dipandang melebihi manusia rata-rata dan digambarkan menyaingi kekuatan binatang buas singa.³⁰

Kabupaten Kutai Timur semula terdiri dari 5 kecamatan, kemudian berdasarkan peraturan daerah nomor 16 tahun 1999, dimekarkan menjadi 11 kecamatan. Pada tahun 2005, berdasarkan perda nomor 12 tahun 2005, kabupaten Kutai Timur dimekarkan lagi menjadi 18 kecamatan. Berikut adalah gambaran peta wilayah kabupaten Kutai Timur :

²⁹ Laporan Studi Lapangan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Kaltim Prima Coal (KPC), Kutai Timur-Kalimantan Timur : Di Tepi Sangata, Mendengar Suara-Suara Yang Hilang

³⁰ Ibid

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kab. Kutai Timur



Sumber : Laporan Studi Lapangan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Kaltim Prima Coal (KPC), Kutai Timur-Kalimantan Timur

Wilayah kab. Kutai Timur seluas 35.747 km² atau 3.429.260 Ha merupakan 17% dari luas wilayah propinsi Kalimantan Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Table 3.1 Batas Wilayah di Kabupaten Kutai Timur

BAGIAN	BATASAN
Utara	Berbatasan dengan kecamatan Taliyasan dan kecamatan Kelay (Kabupaten Berau)
Timur	Berbatasan dengan selat Makassar dan laut Sulawesi
Selatan	Berbatasan dengan Bontang utara dan kec. Marang kayu (Kabupaten Kutai Kertanegara)
Barat	Berbatasan dengan kec. Kembang janggut dan kec. Tabang (Kabupaten Kutai Kertanegara)

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim, pada tahun 2004 jumlah penduduk Kutai Timur 168.529 jiwa dengan kepadatan 4,71 penduduk/km² dan pertumbuhan 1,85%. Sedangkan pada tahun 2008 Jumlah penduduk sebesar 213.759 jiwa dan meningkat menjadi 285.743 jiwa pada tahun 2012. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Timur sebenarnya tidak merata sepanjang tahun. Sebagai contoh, pertumbuhan penduduk periode 2008-2009 sebesar 15 persen, periode 2009-2010

sebesar 4 persen, periode 2010-2011 sebesar 5,72 persen, sedangkan periode 2011-2012 sebesar 5,72 persen.³¹

Komposisi penduduk Kutai Timur sangat heterogen, terdiri dari suku Kutai, Dayak, Jawa, Banjar, Bugis, Madura, Toraja dan Batak, serta sedikit etnis Cina. Heterogennya penduduk Kutai Timur tak terlepas operasionalnya ratusan perusahaan tambang Batubara, Perusahaan kayu dan kelapa sawit yang ada di wilayah Kutai Timur.

Bumi Kutai Timur juga kaya dengan sumber daya mineral dan energi. Kandungan minyak yang dimilikinya sekitar 243,4 juta barel, batu bara 3,83 miliar ton dan mengandung potensi mineral lainnya seperti besi, gamping, gipsum dan pasir kuarsa. Batubara adalah salah satu sumberdaya alam utama yang menyebar di kecamatan-kecamatan, baik yang telah dieksploitasi maupun yang masih berupa cadangan.

Tabel 3.2 Kandungan Batubara di Kutai Timur

KECAMATAN	SUMBER DAYA		KETERANGAN
	CADANGAN	(TON)	
Sangatta	570.000.000	2.454.000.000	KPC
Bengalon	187.000.000	438.000.000	KPC
Sangkulirang	-	205.000.000	MONECO

³¹ Dikutip dari <http://bappeda.kutaitimurkab.go.id/media/kda2013.pdf> diakses pada 16 April 2014

Busang	70.000.000	209.000.000	MONECO
Long Less	-	519.610.000	-
Kabupaten	827.000.000	3.825.610.000	-

Sumber : Laporan Studi Lapangan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Kaltim Prima Coal (KPC), Kutai Timur-Kalimantan Timur

Kekayaan sumberdaya batubara ini tak pelak menyebabkan pergerakan ekonomi daerah Kutai Timur sebgaiian besar ditopang oleh sektor pertambangan. Perputaran roda ekonomi ini didorong oleh kehadiran perusahaan besar pertambangan salah satunya dan yang terbesar adalah PT. Kaltim Prima Coal.

Melihat keadaan di kab. Kutai Timur khususnya Sangatta, masyarakatnya dapat digolongkan ke dalam tiga jenis yaitu penduduk asli atau masyarakat adat (Urang Kutai), masyarakat pendatang non karyawan dan karyawan PT. Kaltim Prima Coal sendiri. Dari ketiga jenis masyarakat ini tentu memiliki hubungan dan interaksi yang berbeda-beda dengan PT. KPC.

Masyarakat adat selain sebagai suku asli kab. Kutai Timur juga merupakan tuan rumah di wilayah tersebut. Dalam hal ini PT. KPC selaku perusahaan yang beroperasi di Sangatta perlu menghormati masyarakat adat dengan menjalankan kegiatan operasional tanpa mengusik keberadaan suku tersebut dan memberikan perlakuan yang baik dengan selalu menjalin hubungan yang positif.

Kemudian masyarakat pendatang non karyawan, mereka adalah pendatang dari luar wilayah untuk bekerja dan bertempat tinggal di Kab. Kutai Timur dengan

mayoritas mata pencaharian sebagai pedagang, berladang atau PNS. Secara hubungan mereka memang tidak memiliki hubungan langsung dengan PT. KPC, namun karena bertempat tinggal di wilayah Kutai Timur yang merupakan kawasan sekitar tambang batubara maka sedikit banyak interaksi yang dilakukan oleh PT. KPC akan juga mereka rasakan.

Dan terakhir adalah karyawan PT. KPC sendiri yang terdiri dari pendatang maupun masyarakat tempatan atau sering kali disebut dengan putra daerah. Sebagai pekerja di perusahaan tambang batubara PT. KPC, para karyawan ini memiliki hubungan langsung karena memiliki kontrak kerja dengan batas waktu tertentu. Sehingga para karyawan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari adanya PT. KPC.

B. Penambangan Batubara PT. Kaltim Prima Coal

Penambangan batubara terdiri dari beberapa macam metode, hal tersebut disesuaikan dengan letak batubara yang akan diambil. Terdapat empat macam metode yang digunakan dalam proses penambangan batubara. *Pertama* adalah penambangan terbuka (*Open Pit Mining*), metode ini dijalankan dengan melakukan kegiatan menambang batubara tanpa melakukan penggalian berat karena karena letak batubara yang dekat dengan permukaan bumi. *Kedua* adalah penambangan dalam, metode ini dijalankan dengan teknik membuat terowongan yang tegak hingga mencapai lapisan batubara. Selanjutnya dibuat terowongan datar untuk melakukan penambangan. *Ketiga* adalah penambangan jauh, metode ini dilakukan ketika area batubara berada

di bawah bukit kemudian dibuat terowongan miring hingga mencapai lapisan batu bara. *Keempat* adalah penambangan di atas permukaan, metode ini dilakukan jika batubara yang diincar berada pada perut bukit, yang di mana perlu terowongan datar untuk dapat mulai menambang batubara tersebut.³²

PT. KPC sendiri menggunakan sistem penambangan terbuka, di area penambangan terbuka beraneka macam kendaraan berat sibuk melakukan kegiatan penambangan. *Excavator* menggali, mengambil, kemudian menumpahkan batubara ke dalam bak dump truck yang sudah siap menunggu. *Dump truck* yang sudah penuh batubara kemudian berjalan menuju tempat penampungan sementara di pelabuhan. Dari tempat penampungan sementara, batubara dimasukkan ke dalam kapal pengangkut dengan menggunakan *belt conveyor*. Kapal pengangkut yang sudah penuh batubara pergi meninggalkan pelabuhan menuju tempat tujuan. Sebagian besar menuju ke luar negeri, menuju negara import.

Proses penambangan terbuka yang dilakukan PT. KPC tentu saja akan berdampak pada perubahan suatu lingkungan. Tentunya kemudian juga menyebabkan kerusakan yang tak dapat diperbaiki terhadap tanah, sumber air, udara, dan juga membahayakan kesehatan, keamanan, dan penghidupan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan. Endang Ruchijat selaku CEO PT. KPC mengatakan bahwa pada pola operasinya yang paling merusak, pertambangan batubara merubah puncak-puncak gunung menjadi lubang raksasa dengan cara meledakkannya. Ini

³² Dikutip dari <http://indonesiaindonesia.com/f/90102-metode-pertambangan-batubara/> diakses pada 15 November 2013.

adalah cara termurah yang dipraktekkan oleh banyak perusahaan pertambangan batubara di Indonesia.³³

Peledakan puncak gunung ini bertujuan untuk mencapai lapisan tipis batubara yang terkubur di bawahnya, dan kemudian untuk meminimalkan biaya pembuangan limbah, jutaan ton limbah dan batuan dibuang ke lembah dan sungai di bawahnya. praktek seperti inilah yang menyebabkan kerusakan permanen pada ekosistem dan lanskap. Praktek seperti ini juga menyebabkan banyak puncak-puncak gunung di Kalimantan, berubah menjadi danau-danau raksasa yang penuh dengan zat beracun dan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Pada prosesnya sisa dari lahan pertambangan PT. KPC akan meninggalkan danau bekas tambang (*Void*). Dalam perjanjian dari semua luas void PT. KPC akan meninggalkan 26 % void yang tidak akan ditimbun. Sementara void yang lainnya akan ditimbun dan saat ini satu void telah difungsikan sebagai daerah wisata.³⁴

Berdasarkan perjanjian PKP2B, PT. KPC memiliki area konsesi seluas 90.938 ha. Pada tahun 2002 PT. KPC membuka lahan seluas 5.865 hektar dari luas area konsensi. Di tahun 2002 pula PT. KPC mereboisasi 1.860 hektar areal bekas tambang di Kabupaten Kutai Timur.³⁵ Kemudian pada tahun 2011, PT. KPC kembali

³³ Dikutip dari http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=2&newsnr=5997 diakses pada 5 Januari 2014

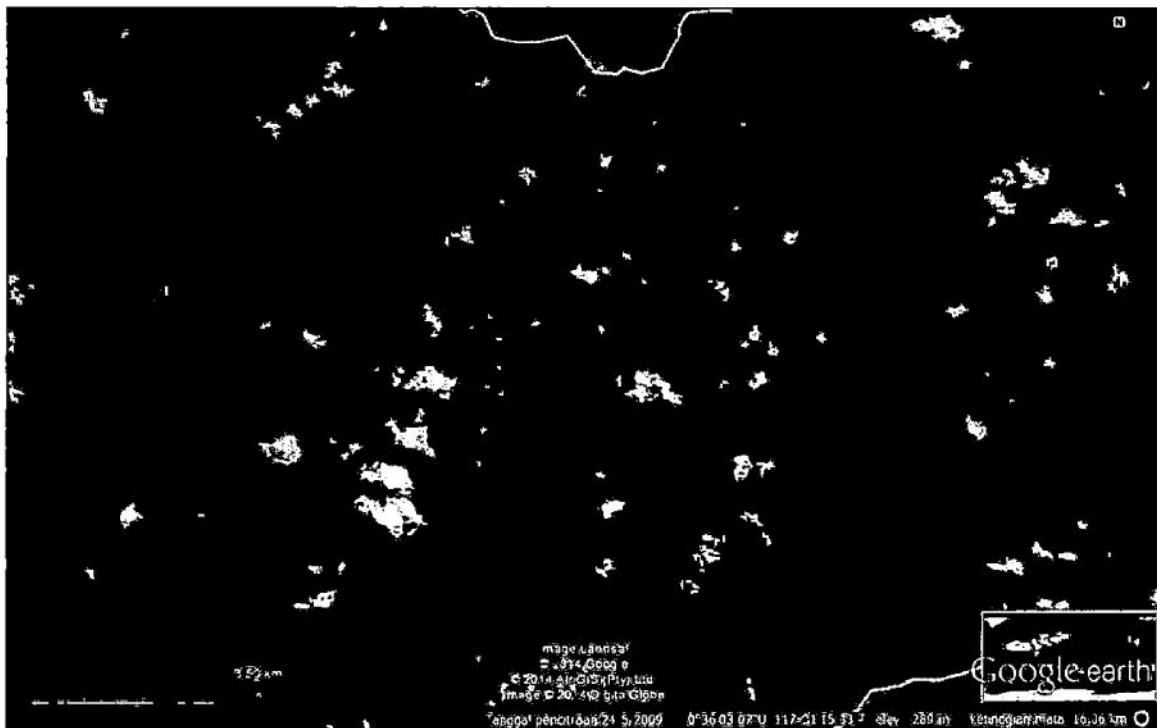
³⁴ Dikutip dari http://www.academia.edu/4419709/Batubara_Mematikan_Jejak_kerusakan_batubara_dari_pertambangan_sampai_ke_pembakarandiakss pada 6 Januari 2014

³⁵ Dikutip dari http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=2239&coid=2&caid=19&gid=4 diakses pada 5 Juli 2014

membukan lahan seluas 1.511,9 ha dari 2.066,4 ha yang diizinkan oleh Pemerintah. Sementara area reklamasi bertambah menjadi 4.407,3 ha yang ditanami lebih dari 2,4 juta batang pepohonan dan tumbuhan dari beragam spesies dengan daya serap CO2 tinggi. Pada tahun 2012 area reklamasi meningkat menjadi 5.876 ha dan jumlah tanaman menjadi lebih dari 2,6 juta pepohonan dan tumbuhan dari beragam species. Keadaan hutan yang sebelumnya hijau kemudian berubah menjadi lahan tambang batu bara PT. KPC dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.2.
Peta Tambang Batubara PT. KPC

Skala 1 : 350.000



Sumber : Google Earth

Berdasarkan data tersebut, maka kondisi lahan pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3 Kondisi Lahan Area Konsesi PT. KPC

KONDISI LAHAN	LUAS
Areal belum dibuka	67.985 ha
Areal terganggu	17.077 ha
Areal reklamasi	5.876 ha
Total	90.938 ha

Dari table tersebut terlihat bahwa lokasi tambang yang sudah dibuka oleh PT KPC baru sekitar seperlima dari total seluruh lahan konsesi yaitu 17.077 ha dari 90.938 ha. Sementara total lahan yang direklamasi sekitar sepertiga dari luas tambang yang di buka yaitu 5.876 ha dari 17.077 ha. Lambatnya perluasan wilayah reklamasi dikarenakan proses revegetasi lahan paska tambang membutuhkan waktu yang cukup lama.

C. Dampak Sosial

Efek negatif dari operasi pertambangan batubara PT. KPC di kab. Kutai Timur berdampak pada kehidupan masyarakat. Beberapa data menunjukkan hal itu, di mana dampak negatif dari penambangan batubara ini berkaitan dengan hak hidup dan hak atas tanah bagi masyarakat adat yang telah tinggal di sekitar lokasi pertambangan secara turun-temurun.

Seperti pengusuran yang dialami oleh Masyarakat Adat Dayak Basap di Kecamatan Bengalon, Sangatta, yang sudah berulang kali pindah dan digusur dari tanah mereka sendiri. Masyarakat adat dayak Basap yang sejatinya terbiasa memenuhi kebutuhan hidup mereka secara subsisten dari hasil berburu dan berladang, kini kehilangan itu semua setelah PT. KPC mulai beroperasi di tanah mereka sejak tahun 1992. Setelah beberapa kali pindah dan tergusur, saat ini sebagian dari mereka bermukim di wilayah Segading, hulu Sungai Lemba.³⁶

Hingga tahun 2008 terdapat beberapa pengggusuran lahan oleh PT. KPC. Sekitar 35 ribu ha lahan di bebaskan PT. KPC, di mana sebagian besar dengan cara perampasan. Pada 1986, perusahaan menggusur lahan 73 keluarga di kecamatan Sangatta tanpa ganti rugi, untuk dibangun pemukiman karyawan. Empat tahun berikutnya, sekitar 32,35 ha lahan tambak milik 20 keluarga Sangatta di Muara Bengalon, juga diambil paksa untuk lokasi penumpukan batubara. Tak ada ganti rugi, bahkan warga dilarang memasuki wilayah tersebut. Pada 2007, perusahaan mengerahkan 150 personel Polres, Polisi Militer dan Satpol PP mengeksekusi lahan

³⁶ Greenpeace Asia Tenggara, *Report Batubara Mematikan*. 2010, hlm. 10

petani Desa Singa Gembara seluas 27 ha. Di kecamatan Bengalon hingga 2008, tanah yang dirampas PT. KPC dengan dalih dijadikan jalur hijau sekitar 20.482 Ha milik 287 keluarga. Tanah itu dihargai rata-rata Rp.11,9 permeter atau Rp.11 ribu per ha, sudah termasuk tanam tumbuh dan benda-benda lain di atasnya.³⁷

Para penduduk desa yang tinggal di dekat tambang PT. KPC Sangatta juga memiliki pengalaman panjang akan penggusuran paksa, hilangnya mata pencaharian, polusi, dan kolusi perusahaan dengan petugas keamanan negara. LSM Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) bahkan menyerukan penghentian rencana relokasi masyarakat tersebut ke desa lain yang telah dipersiapkan PT. KPC.³⁸

Andrew Hickman dari organisasi lingkungan *Down to Earth* (DTE) yang berbasis di Inggris, juga menyatakan masalah penggusuran dan konflik lahan akibat operasi perusahaan pertambangan PT. KPC. Setelah menemui warga lokal dan masyarakat adat yang tinggal dekat dengan wilayah tambang PT. KPC. Hickman menyatakan dalam keterangannya bahwa penduduk yang tinggal dekat kawasan tambang terus mengalami penggusuran dan kehilangan nafkah.³⁹

Padahal tanah dan hutan yang mereka tempati merupakan warisan leluhur yang bukan sekedar sebagai harta kekayaan tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai sumber

³⁷ Kompilasi Data Jatam kaltim, 2009-<https://www.facebook.com/notes/cerita-dayak/pt-kpc-menjamin-masa-depan-suram-kutai-timur/282968921222>

³⁸ Dikutip dari <http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/keluar-dan-enyahlah-dari-tanah-kami-seru-komunitas-adat-ke-bumi> diakses pada 2 Maret 2014

³⁹ Dikutip dari <http://news.bisnis.com/read/20130630/78/147851/konflik-agraria-lahan-adat-kian-tergerus> diakses pada 20 April 2014

kehidupan dan menjadi bagian dari hidup mereka secara tidak terpisahkan. Oleh karena itu keberadaan hutan merupakan keberadaan mereka sendiri.⁴⁰

Mengenai kesejahteraan masyarakat, di kab. Kutai Timur terdapat 135 desa namun hanya 37 desa yang teraliri listrik. Sementara untuk mengoperasikan tambangnya, perusahaan PT. KPC malah ditopang PLTU Tanjung Bara dan 2 PLTD lain yang menghabiskan listrik 18,9 MW setara dengan kebutuhan listrik 21.000 rumah tangga atau separuh dari total penduduk Kutai Timur (50.175 KK). Jika dilihat hal ini merupakan kondisi yang kontras, kab. Kutai Timur merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam untuk membangkitkan listrik namun justru kekurangan pasokan listrik.⁴¹

Kemudian dalam isu ketenaga kerjaan, adanya PT. KPC menyebabkan banyaknya pendatang dari luar pulau Kalimantan. Sedangkan suku asli seperti Kutai dan Dayak justru menjadi minoritas.⁴² Pada tahun 2011 muncul kecemburuan sosial antara putera daerah dengan karyawan yang notabene pendatang. Mereka menuntut lapangan pekerjaan atas eksploitasi PT. KPC di tanah mereka. Hal ini disebabkan selama ini PT. KPC dianggap belum berpihak kepada putra daerah. Alasannya adalah SDM dari putera daerah belum terlalu berkualitas karena kurangnya pendidikan dan pelatihan.

⁴⁰ Herman Soesangobeng, *Filosofi Adat Dalam UUPA*, Jakarta: Oktober 1998, Manuskrip, hal. 3- 7

⁴¹ Dikutip dari <http://nasional.kompas.com/read/2011/03/04/09302540/Jatam.Berharap.pada.KPK> diakses pada 10 April 2014

⁴² Dikutip dari <http://migas.bisbak.com/6404.html> diakses pada 10 April 2014

Dari data-data tersebut, tampak dampak negatif yang timbul akibat proses pertambangan PT. KPC sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Kutai Timur. Keberadaan PT. KPC dirasa mengancam terkait masalah pengambilan hak hidup dan hak atas tanah bagi masyarakat adat yang telah tinggal di sekitar lokasi pertambangan secara turun temurun selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun.

D. Dampak Lingkungan

Selain dampak sosial operasi pertambangan batubara juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak tersebut di antaranya meliputi air, udara dan tanah. Sistem penambangan PT. KPC yang menggunakan penambangan terbuka mengakibatkan perubahan rona awal lingkungan termasuk gangguan terhadap keanekaragaman hayati.

Pencemaran Air

Terkait masalah pencemaran air, Wakil. Ketua Laskar Anti Korupsi (LAKI) DPD Kaltim Albert M. Sekeon, didampingi Biro Lingkungan Hidup (BLH) menyebutkan, salah satu contoh dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan eksploitasi tambang Batubara PT. KPC selama ini adalah tentang pencemaran air bersih yang sangat diresahkan warga Kutim (Alur sungai Sangata). Air sungai yang dulu dikenal warga bersih, tetapi sejak adanya kegiatan perusahaan tambang seperti PT. KPC air itu kini tercemar dan membahayakan bagi mahluk di sekitarnya. Bahkan

meskipun tidak turun hujan, air sepanjang alur sungai di Kutai Timur kotor karena bercampur lumpur.⁴³

Sungai Sangatta yang berfungsi sebagai sumber kebutuhan puluhan ribu manusia dan ribuan habitat disinyalir mengalami pendangkalan akibat lumpur tambang dan juga menjadi keruh karena adanya buangan limbah tambang yang berasal dari Sungai Bendili di tambang PT. Kaltim Prima Coal.⁴⁴ Masyarakat mengaku semenjak terjadi pencemaran di sugai Bandili mereka tidak dapat memanfaatkan air sungai tersebut seperti biasanya. Sedangkan, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kab. Kutai timur mengeluhkan pencemaran ini karena sumber air yang dipakai ialah air sungai bandili dan karena air sungai bercampur dengan lumpur, maka Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kab. Kutai Timur tidak dapat menggunakan sebagaimana mestinya.⁴⁵ Hal tersebut terjadi disebabkan jebolnya *Settling Pond* milik PT. KPC yang kemudian mengakibatkan limbah yang berada di kolam penampungan mengalir ke arah sungai bendili kecamatan Sangatta.⁴⁶

Selain itu warisan pasca tambang akan meninggalkan banyak warisan yang berpotensi bahaya dalam jangka panjang. Seperti lubang tambang (*pit*) air asam tambang (*Acid Mine Drainage*) dan Tailing. Lubang-lubang raksasa tersebut berpotensi menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang, terutama kualitas dan

⁴³ Dikutip dari <http://www.wartasidik.com/?p=567> dikses pada 7 Januari 2014

⁴⁴ Dikutip dari www.antaraneews.com/berita/363941/dprd-kpc-tanggung-jawab-atas-pencemaran-sungai-sangatta diakses pada 30 Oktober 2013

⁴⁵ Siti Kamsiah, Penerapan sanksi administrasi terhadap kasus pencemaran air oleh PT. KPC di sungai Bandili kab. Kutai Timur, fakultas hukum univ. Mulawarman.

⁴⁶ Ibid

kuantitas air. Air asam tambang berpotensi mencemari air permukaan dan air tanah. Sekali terkontaminasi terhadap air akan sulit ditanggulangi.

Krisis Tanah

Tambang batubara mewariskan penipisan sumber daya alam, lubang-lubang raksasa, air asam tambang, logam berat dan tailing. Tanah bekas tambang reklamasi tidak akan kembali subur. Selain itu tailing dari operasi pertambangan dalam jumlah sangat besar, sekitar 97 % akan mengandung logam-logam berat dalam kadar yang cukup mengkhawatirkan, seperti tembaga, timbal atau timah hitam, meelain merkuri, seng, dan arsen.⁴⁷ Ketika masuk dalam tubuh mahluk hidup, logam-logam berat tersebut akan terakumulasi di dalam jaringan tubuh dan dapat menimbulkan efek yang membahayakan bagi kesehatan manusia.

Aktivitas pertambangan batubara PT. KPC merubah kawasan-kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah tangkapan air menjadi daerah-daerah pertambangan yang terbuka tanpa vegetasi tanaman penutup, akibatnya pada saat musim penghujan, saat debit air hujan tinggi sementara daerah tangkapan air sudah berkurang karena telah berubah menjadi areal pertambangan sementara daerah tangkapan air yang ada tak mampu lagi menampung air hujan ditambah lagi dengan terjadinya sedimentasi di sungai Sengata akibat limbah lumpur dari aktivitas pengolahan batubara KPC, maka yang terjadi adalah banjir yang dipastikan selalu

⁴⁷ Warta sidik edisi perdana, 29 Desember – 13 desember 2010, hal. 3

melanda Kutai Timur setiap tahun. Hal ini diungkapkan langsung oleh Bupati Kutai Timur Awang Faroek saat mengunjungi korban banjir di Kec. Sengata.⁴⁸

Pada tahun 2001 beberapa desa di kab. Kutai timur mengalami banjir, seperti Desa Teluk Pandan, Sangkimah, Sengatta Selatan, Singageweh, Teluk Lingga, Sengatta Utara (kecuali Suarga Bara/perumahan PT. KPC). Banjir dimulai dari Tanggal 11 hingga 16 Februari 2001, di mana sekitar 10.000 rumah dan 6 sekolah ikut terendam dalam ketinggian air berkisar antara 15 cm - 100 cm. Hampir semua desa yang berada di dalam dan sekitar Taman Nasional Kutai terendam air.⁴⁹

Polusi Udara

Selain air dan tanah dampak operasi pertambangan PT. KPC juga berpengaruh terhadap kualitas udara. Penggalan dan penimbunan tanah, peledakan (*blasting*), pengangkutan batubara melalui jalan-jalan umum dan aktifitas pertambangan lainnya menimbulkan peningkatan konsentrasi debu yang menurunkan kualitas udara dan mengganggu kesehatan masyarakat yang berada di sekitar tambang, terutama terhadap penyakit-penyakit saluran pernafasan atas. Dampak debu ini semakin terasa pada saat musim kemarau tiba. Saat PMI melakukan kegiatan pengobatan gratis pada warga Desa Singa Geweh rata-rata warga menderita Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) seperti batuk, pilek, dan lain-lain.⁵⁰

⁴⁸ Laporan Studi Lapangan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Kaltim Prima Coal (KPC), Kutai Timur-Kalimantan Timur, *Di Tepi Sangata, Mendengar Suara-Suara Yang Hilang*, hal. 14

⁴⁹ Lany Erinda Ramdhani, *Banjir Sebagai Dampak Deforestasi Di Kal-Tim*.

⁵⁰ Op cit, hal . 15

Selain itu data kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Bengalon, Kabupaten Sangatta juga menunjukkan penyakit yang paling menjadi momok bagi masyarakat Bengalon adalah penyakit-penyakit yang terkait dengan pernapasan yang diduga akibat dampak dari pertambangan batubara, seperti ISPA, asma, bronchitis dan radang paru-paru akibat debu batubara.⁵¹

Pada tahun 2011, Dinas Kesehatan Kutai Timur melalui Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP), mencatat penyakit terbanyak yang diderita masyarakat di seluruh wilayah Kutai Timur, yakni infeksi akut lain pada saluran pernapasan bagian atas yakni sebanyak 17.257 kasus, disusul darah tinggi 4.458 kasus, kemudian penyakit pada sistem otot dan pengikat sebanyak 4.399 kasus, diare 4.209 serta penyakit kulit alergi sebanyak 4.101.⁵² Dari data-data tersebut penyakit yang berkenaan dengan pernafasan sangat sering ditemui pada masyarakat di sekitar kab. Kutai timur. Hal tersebut berkaitan dengan kualitas udara yang buruk akibat dampak dari operasi pertambangan PT. KPC.

⁵¹ Dikutip dari

http://www.academia.edu/4419709/Batubara_Mematikan_Jejak_kerusakan_batubara_dari_pertambangan_sampai_ke_pembakaran diakses pada 12 Maret 2014

⁵² Dikutip dari <http://migas.bisbak.com/6404.html#tenaga-kerja>

E. Respon Masyarakat

Dari dampak-dampak negatif yang timbul tersebut kemudian mengundang respon dan tanggapan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam hal ini terdapat empat elemen yang merespon dampak negatif akibat dari proses pertambangan PT. KPC. Keempat elemen tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), masyarakat adat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Badan Lingkungan Hidup

Salah satu lembaga pemerintah yang terkait dengan masalah lingkungan adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH). Pada tahun 2008 BLH kabupaten Kutai Timur memberikan sanksi administrasi berupa surat teguran kepada PT. KPC. Hal tersebut terkait masalah pencemaran air di sungai Bandili, kecamatan Sangatta. Oleh karena itu pihak PT. KPC diminta bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran air tersebut karena telah melanggar pasal 9 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁵³

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sorotan mengenai dampak negatif PT. KPC di kabupaten Kutai Timur juga datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kasmidi Bulang selaku ketua Komisi III DPRD Kab. Kutai Timur dari fraksi Golkar, yang juga Ketua Alumni Perhimpunan Tambang Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar

⁵³ Siti Kamsiah, Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Kasus Pencemaran Air oleh PT. KPC di sungai Bandili kab. Kutai timur, Fakultas Hukum Univ. Mulawarman., loc: Cit.

Wilayah Kalimantan Timur menyatakan bahwa PT. KPC sebagai perusahaan raksasa kelas dunia harus berkomitmen menjaga lingkungan termasuk sungai.⁵⁴

Selain meminta PT. KPC memperhatikan kelestarian sungai dan lingkungan dengan tidak mencemari sungai, pihaknya juga meminta agar Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kutai Timur secara rutin melakukan pengawasan dan monitoring kondisi sungai, baik Sungai Sangatta, Bengalon ataupun sungai lain di Kutai Timur, yang terdapat kegiatan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

Anggota DPRD Piter Palinggi juga mengatakan, PT. KPC harus ikut bertanggung jawab terhadap aliran limbah tambang yang mengalir ke Sungai Sangatta dan yang mengalir ke pemukiman penduduk karena membahayakan masyarakat. Selain itu juga telah terjadi pendangkalan Sungai Sangatta akibat lumpur tambang, sehingga PT. KPC wajib bertanggungjawab melakukan pengerukan sungai.⁵⁵

Masyarakat Adat

Di tahun 2010 Sekitar 150 massa dari masyarakat adat Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur (Kaltim) berunjuk rasa di depan kantor eksternal PT. KPC. Aksi tersebut sebagai pernyataan kekecewaan masyarakat adat Sangatta kepada perusahaan tambang batubara PT. KPC yang tidak merespon surat mereka. Masyarakat adat sebagai masyarakat pribumi menuntut pihak perusahaan memberi kompensasi

⁵⁴ Dikutip dari <http://www.antaraneews.com/berita/363941/dprd-kpc-tanggung-jawab-atas-pencemaran-sungai-sangatta> diakses pada 7 November 2013

⁵⁵ Ibid

Rp10.000 untuk setiap satu metrik ton batubara yang dihasilkan PT. KPC.⁵⁶ Hal tersebut dikarenakan masyarakat adat Sangatta tidak merasakan manfaat dana CSR PT. KPC. Sebab penggunaan dana itu dirasa tidak tepat sasaran dan hanya dinikmati segelintir orang saja. Sementara masyarakat adat sebagai warga asli Sangatta, hanya mendapatkan limbah hasil eksploitasi kekayaan alam Kutai Timur.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat berfungsi sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat. Beberapa LSM merespon terkait dampak negatif yang ditimbulkan dari operasi pertambangan batubara PT. KPC. Di antaranya adalah Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Pada peringatan Hari Anti Tambang 29 Mei 2011, di depan kantor Perwakilan PT. KPC di Jalan S Parman, Samarinda, Kalimantan Timur. Dinamisor Jatam Kaltim Kahar Al Bahri menyatakan dalam orasinya bahwa di Provinsi Kaltim tambang KPC dianggap telah melakukan pelanggaran HAM. Melalui pengusuran yang dialami warga hingga 2010, maka tanah seluas 50 ribu Ha lahan dibebaskan untuk KPC.⁵⁷

Selain itu JATAM Kaltim juga menyuarakan kesenjangan dalam masalah pembagian energi oleh PT. KPC. Dari 135 desa yang ada di Kutai Timur, hanya 37 desa yang mendapatkan layanan listrik. Sementara di Saat yang sama, PT. KPC. menghabiskan 18,9 MW untuk mengoperasikan tambangnya. Hal tersebut setara

⁵⁶ Dikutip dari <http://kaltim.antaranews.com/print/2784/demo-masyarakat-adat-demo-kpc> diakses pada 7 November 2013

⁵⁷ Dikutip dari <http://www.tribunnews.com/regional/2011/05/29/peringati-hari-anti-tambang-jatam-kecam-pt-kpc> diakses pada 4 Desember 2013

listrik yang mengasupi 21 ribu rumah tangga, atau 42 persen kebutuhan listrik warga Kutai Timur.⁵⁸ Selain itu JATAM juga menyerukan pengembalian hutan di sekitar desa yang telah digunakan PT. KPC untuk membuka tambang.

Selain JATAM, LSM yang juga merespon masalah dampak negatif pertambangan PT. KPC adalah LSM Nurani Rakyat Sangatta. Menurut Hery, ketua LSM Nurani Rakyat Sangatta. Sejak PT. Kaltim Prima Coal membangun kolam raksasa untuk menampung air dari tambang, air sungai berubah drastis, keruh dan bercampur tanah. Bahkan, yang menjadi masalah adalah airnya tidak bisa lagi digunakan warga untuk mandi, sebab gatal-gatal dan badan jadi merah-merah. Heri mengatakan bahwa sejak KPC membangun kolam warga protes dan menuntut konvensasi terkait tercemarnya sungai batota.⁵⁹

Berdasarkan data-data tersebut, maka kasus-kasus yang mengundang respon berbagai elemen masyarakat dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

⁵⁸ Dikutip dari <http://www.tambangnews.com/berita/utama/2344-jatam-bakrie-kpc-merampok-warga-kaltim.html> diakses pada 4 Desember 2013

⁵⁹ Dikutip dari <http://kaltim.antaranews.com/print/8728/perusahaan-tambang-sangatta-diduga-cemari-sungai> diakses pada 15 Desember 2013

Tabel 3.4 Respon Masyarakat atas Dampak Operasi Pertambangan PT.

Kaltim Prima Coal

ELEMEN	KASUS	PEMILICU
Badan Lingkungan Hidup (BLH)	-Pencemaran Sungai Bendili	-Aliran limbah tambang yang mengalir ke Sungai Sangatta akibat jebolnya <i>Settling Pond</i> milik PT. KPC.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-Pecemaran sungai Sangatta	-Pendangkalan sungai Sangatta akibat lumpur tambang.
Masyarakat Adat	-Pembagian Kompensasi -Kecemburuan Sosial	-Tidak merasakan manfaat dana CSR. -Mayoritas karyawan PT. KPC pendatang dari luar.
LSM JATAM	-Pelanggaran HAM -Pemerataan Kesejahteraan	-Penggusuran Masyarakat Adat Dayak Basap di Kec. Bengalon. -Kesenjangan dalam pembagian energi listrik.
LSM Nurani Rakyat Sangatta	-Pencemaran air sungai Batota	-Kolam penampung air raksasa PT. KPC menampung air menjadi keruh dan bercampur tanah.

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dampak yang ditimbulkan dari operasi pertambangan PT. KPC begitu berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan lingkungan. Hal tersebut kemudian mengundang respon dan protes dari berbagai elemen masyarakat. PT. KPC sebagai perusahaan, dituntut untuk bertanggung jawab atas dampak negatif tersebut. Tuntutan atas tanggung jawab tersebut disampaikan agar terjadi situasi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak dengan

tujuan tercapainya kehidupan yang sejahtera dan lebih baik. Selain itu repon dan protes masyarakat juga dipicu oleh adanya ketimpangan yang terjadi, di mana PT. KPC mendapatkan keuntungan dari hasil bumi Kutai Timur sementara masyarakat sekitar justru mendapatkan kerugiannya.

Melihat dampak-dampak ini, kemudian menjadi pertimbangan bagi PT. KPC untuk melakukan suatu upaya tanggung jawab yang dicerminkan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Pada ranah sosial terjadi masalah seperti kecemburuan sosial, sengketa lahan serta masalah listrik dan air, maka PT. KPC berupaya menyelesaikan masalah ini melalui program pendidikan dan pelatihan terhadap putra daerah Kutai Timur agar memiliki kualitas yang siap kerja. Selain itu juga diadakan program peningkatan ekonomi melalui pengembangan ekonomi lokal sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan penyediaan infrastruktur yang baik terutama listrik dan air.

Pada ranah lingkungan terjadi masalah seperti menurunnya kualitas air dan udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat, maka PT. KPC juga berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan penyediaan fasilitas kesehatan dan pengobatan pada masyarakat. Selain itu juga terdapat usaha-usaha pelestarian alam seperti pelestarian hutan dan pemanfaatan lahan paska tambang sebagai tempat wisata alam.